

BAB IV

FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG JEPANG DALAM PENYELESAIAN ISU *COMFORT WOMEN* DENGAN KOREA SELATAN

Keputusan Jepang menyelesaikan konflik *comfort women* dengan Korea Selatan tahun 2015 merupakan keputusan yang diambil dengan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pada Bab ini akan dipaparkan tiga faktor yang paling mempengaruhi Jepang sehingga pada akhirnya isu *Comfort women* dapat diselesaikan setelah kurang lebih 24 tahun menjadi permasalahan besar bagi Jepang dan Korea Selatan. Tiga faktor tersebut yaitu pertama, kondisi ekonomi Jepang yang membutuhkan kerja sama ekonomi untuk meningkatkan kembali perekonomiannya. Kedua, adanya tuntutan dalam negeri Jepang. Ketiga, terdapat desakan dari Amerika Serikat dan Korea Selatan untuk menyelesaikan isu *Comfort women* yang telah lama menjadi batu penghalang hubungan bilateral Jepang-Korea Selatan.

A. Jepang Membutuhkan Kerjasama Ekonomi dengan Korea Selatan

Jepang merupakan negara yang dikenal memiliki pertumbuhan ekonomi pesat, negara ini juga sempat berada pada urutan ke 3 sebagai negara dengan ekonomi tertinggi di dunia. Namun demikian, keadaan ekonomi Jepang saat ini sedang mengalami perubahan. Dalam dua dekade terakhir, Jepang mengalami penurunan pada pertumbuhan ekonominya. Melemahnya perekonomian Jepang tersebut disebabkan oleh beberapa hal, termasuk krisis ekonomi dan bencana alam. Bencana alam yang terjadi pada

tahun 2011 menyebabkan reaktor nuklir Jepang mengalami kerusakan dan mengakibatkan kebocoran yang terjadi pada tahun 2013. Hal itu membuat pemerintah Jepang harus menutup reaktor tersebut. Efeknya, Jepang membutuhkan suply dari luar untuk memenuhi kebutuhan nuklirnya sebagai pembangkit listrik (BBC, Kebocoran lagi di reaktor nuklir Jepang, 2013).

Berkaitan dengan pelemahan perekonomian Jepang tersebut, Shinzo Abe, yang mulai menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang pada tahun 2012, menetapkan paket kebijakan ekonomi yang disebut dengan 'Abenomic'. Dalam abenomic, terdapat tiga poin utama yaitu fiskal, moneter dan reformasi ekonomi melalui sektor agrikultur, industri dan kesehatan (TheEconomist, 2013).

Namun demikian, kebijakan yang dibentuk sejak Shinzo Abe tersebut tidak memberikan efek yang baik bagi Jepang. Pada kenyataannya perekonomian Jepang tidak meningkat secara signifikan.

GDP Jepang pada tahun 2013 mengalami kenaikan yang baik di kuartal pertama tahun 2013, namun pada kuartal kedua hingga terakhir, GDP Jepang tercatat semakin menyusut hingga kuartal keempat. Pada tahun 2014 GDP Jepang mengalami penyusutan sebesar 6,8% (BBCIndonesia, 2014). Kemudian pada tahun 2015, GDP Jepang mengalami penurunan kembali sebesar 1,6% pada kuartal kedua (Lestarini, 2015). Pada kuartal keempat di tahun yang sama mengalami kemerosotan kembali sebesar 1.4% (Ujikane, 2016).

Grafik 4.1

GDP Jepang Tahun 2007-2016



Sumber : Trading Economics, 2017

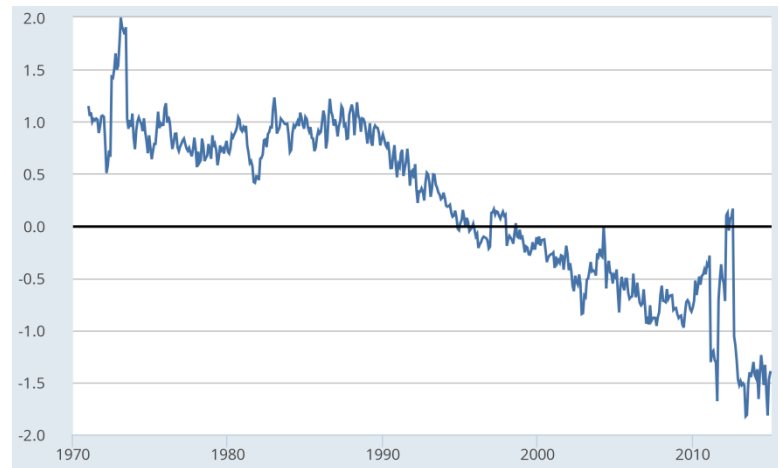
Penyusutan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir menyebabkan Jepang harus memutar ulang strategi agar perekonomian Jepang tidak menyusut pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2014, penyusutan yang terjadi diakibatkan oleh kenaikan pajak penjualan yaitu dari 5% ke 8% pada bulan April tahun 2014 yang menyebabkan angka konsumsi merosot (BBCIndonesia, 2014). Sedangkan penyusutan pada tahun 2015 pada kuartal kedua disebabkan oleh kemerosotan jumlah ekspor dimana konsumen mengurangi nilai belanjanya dan konsumsi pribadi yang menurun hingga 0.8% (Lestarini, 2015).

Masalah lain yang memengaruhi melemahnya GDP Jepang ada pada tingkat populasi manusia. Sebagai negara maju, Jepang memiliki tingkat kelahiran yang rendah. Populasi Jepang didominasi oleh lansia yang mayoritas tidak bekerja atau sudah pensiun. Masalah ini tidak dapat dipecahkan dengan kebijakan moneter seperti halnya tingkat pengangguran

pada masyarakat usia aktif bekerja. Abenomic hanya berhasil dalam mengatasi tingkat pengangguran di Jepang (Yglesias, 2015).

Grafik 4.2

Populasi Penduduk Usia Kerja Jepang (15-64 Tahun)

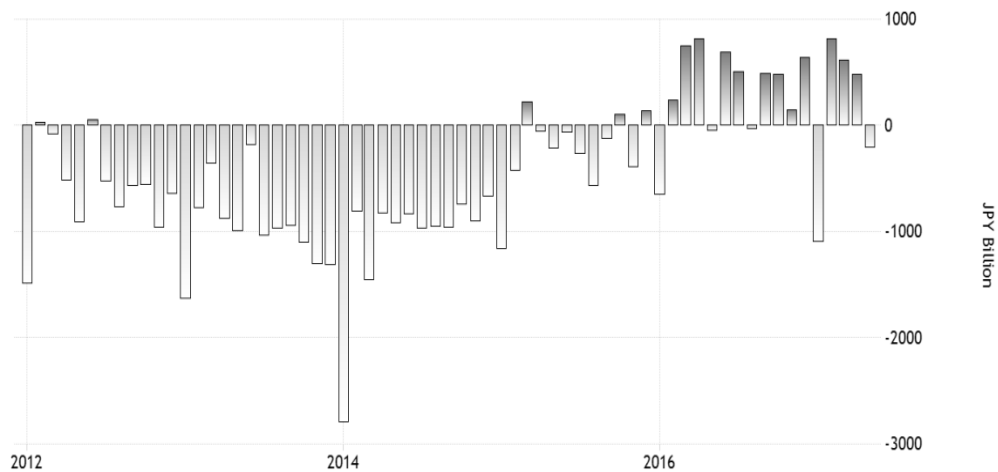


Sumber : organization for economic co-operation and development
Research.stlouisfed.org

Di samping kemerosotan GDP yang terjadi, melemahnya perekonomian pada masa pemerintahan Shinzo Abe dapat dilihat juga pada indikator neraca perdagangannya serta data ekspor dan impor Jepang. Melemahnya mata uang yen yang terjadi berakibat pada turunnya jumlah ekspor Jepang dan menjadikan defisit neraca perdagangan semakin tinggi. Neraca perdagangan Jepang tahun 2013 mengalami defisit sebesar US\$ 117,96 miliar, meningkat 36,26% dibandingkan dengan tahun 2012, yang tercatat defisit sebesar US\$ 86,57 miliar.

Grafik 4.3

Neraca Perdagangan Jepang Periode 2012-2016



Sumber : tradingeconomics.com

Total perdagangan Jepang-Dunia pada tahun 2013, tercatat sebesar US\$ 1.548,30 miliar, atau turun 8,06% dibandingkan tahun 2012, yang tercatat sebesar US\$ 1.683,95 miliar. Total perdagangan tersebut terdiri dari ekspor Jepang ke Dunia sebesar US\$ 715,17 miliar dan mengalami penurunan 10,46% dibandingkan dengan tahun 2012 yang tercatat sebesar US\$ 798,69 miliar, dan impor sebesar US\$ 833,13 miliar, angka tersebut tercatat turun 5,89% dibanding periode yang sama tahun 2012, yaitu sebesar US\$ 885,26 miliar (laporan perkembangan perdagangan Jepang oleh atase perdagangan KBRI di Tokyo tahun 2014).

Defisit tahun 2013 ini terjadi karena pelemahan nilai mata uang yen yang mendorong kenaikan biaya impor energi. Impor energi Jepang meningkat karena semua reaktor nuklir Jepang ditutup. Penutupan reaktor nuklir dilakukan oleh pemerintah karena adanya kebocoran pada reaktor

akibat bencana alam ditahun 2011 (BBC, Rekor Defisit Perdagangan Jepang, 2014).

Defisit perdagangan Jepang masih berlanjut di tahun 2014 mencapai US\$ 121,85 miliar, meningkat 3,48% dibanding periode yang sama tahun 2013.. Total perdagangan Jepang-Dunia tahun 2014, tercatat sebesar US\$ 1.503,67 miliar, atau turun 2,83% dibanding dengan periode yang sama tahun 2013. Total perdagangan tersebut terdiri dari ekspor Jepang ke Dunia sebesar US\$ 690,91 miliar, atau turun 3,35%, dan impor sebesar US\$ 812,76 miliar, atau turun 2,39% dibanding periode yang sama tahun 2013, yang tercatat sebesar US\$ 832,63 miliar (laporan perkembangan perdagangan Jepang oleh atase perdagangan KBRI di Tokyo tahun 2015) .

Neraca perdagangan Jepang tahun 2015 mengalami defisit sebesar US\$ 23,55 miliar, lebih baik dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2014. Total perdagangan Jepang-Dunia pada tahun 2015, mengalami penurunan 15,30% yaitu menjadi US\$ 1.273,63 miliar. Total perdagangan tersebut terdiri dari ekspor Jepang ke Dunia sebesar US\$ 625,04 miliar, turun 9,52% dan impor sebesar US\$ 648,59 miliar, turun 20,22% dari tahun 2014. (laporan perkembangan perdagangan atase perdagangan KBRI di Tokyo, 2016). Naik turunnya neraca perdagangan Jepang menunjukkan bahwa perekonomian Jepang masih sangat tidak stabil. Ancaman defisit neraca perdangan dapat terjadi di tahun-tahun berikutnya jika pelemahan mata uang yen dan tingkat ekspor barang dan jasa Jepang masih tetap rendah.

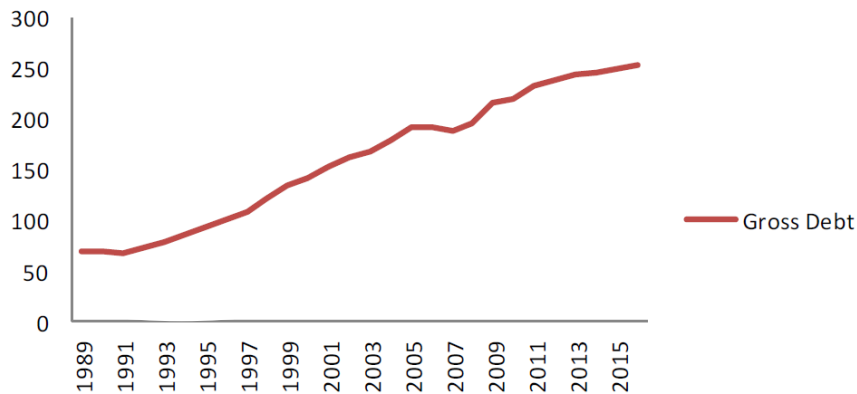
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Jepang pada tahun 2013 tercatat sebesar JPY 92,61 triliun (DetikFinance, 2013). Kemudian pada tahun fiskal 2014 APBN Jepang mengalami kenaikan menjadi JPY 95,88 triliun. Anggaran tersebut naik disebabkan adanya penambahan alokasi militer pertahanan Jepang menjadi JPY 4,88 triliun dan juga karena pada tahun 2014 akan diberlakukan kenaikan pajak penjualan dari 5% menjadi 8%. (Jatmiko, 2013). Di tahun fiskal 2015, APBN Jepang mengalami kenaikan menjadi JPY 96,34 triliun sejalan dengan kenaikan anggaran militer pertahanan Jepang sekitar JPY 4,98 triliun (Kajimoto, 2015).

APBN Jepang berjumlah besar meskipun situasi perekonomian Jepang sedang melemah. Akibatnya, Jepang tidak dapat lepas dari hutang dengan pihak luar. Sempat mendapat predikat sebagai salah satu negara dengan ekonomi kuat di dunia, ternyata Jepang memiliki jumlah hutang yang sangat besar, bahkan lebih besar dari hutang negara Amerika Serikat.

Jepang kini mendapat predikat pemilik hutang terbesar di dunia, dari data IMF mencatat adanya hutang Jepang sejumlah US\$ 11 triliun dengan rasio hutang mencapai 245% dari PDB (produk domestik bruto) negaranya ditahun 2015. IMF telah mendesak Jepang untuk menyusun strategi baru agar hutang negaranya tidak semakin memburuk. Jika hutang Jepang tidak segera ditangani maka hutang tersebut akan meningkat 3 kali lipat di tahun 2030 mendatang (Yan, 2015).

Grafik 4.4

Presentase Hutang Jepang



Sumber : Micro Capitalist Today, 2017.

Dari indikator diatas dapat dilihat bahwa Jepang sedang mengalami krisis ekonomi domestik, masalah-masalah tersebut tentu menjadi masalah pemerintah Jepang. GDP yang semakin menyusut, hutang negara yang semakin menumpuk, neraca perdagangan yang berangsur-angsur mengalami defisit serta kekuatan ekspor yang menurun dan impor energi yang meningkat merupakan masalah-masalah penting yang harus segera diselesaikan. Tentu untuk mengatasi hal tersebut Jepang membutuhkan pihak lain. Jepang memerlukan kerja sama dengan negara lain agar dapat menyuntikkan dana ke Jepang. Negara yang berpotensi dapat bekerja sama tentu merupakan negara yang sepadan dan memiliki hubungan yang baik dengan Jepang.

Jepang memiliki hubungan trilateral dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan di kawasan Asia Timur, Sekutu Jepang yang terdekat adalah Korea Selatan. Pada dasarnya potensi kerja sama bagi Jepang dan Korea

Selatan sangat besar. Namun sayangnya, hubungan Jepang dan Korea Selatan sering memanas akibat konflik yang masih berhubungan dengan sejarah hubungan kedua negara. Meskipun pada dasarnya hubungan bilateral Jepang dan Korea Selatan telah terjalin sejak tahun 1965, hubungan mereka masih terhambat oleh isu *Comfort women* dan isu lainnya seperti kuil Yasukuni, penulisan sejarah dalam buku pelajaran dan perebutan pulau Dokdo/Takeshima (BBC, Japan and South Korea Agree WW2 'Comfort Women' Deal, 2015).

Park Geun Hye juga sempat menyatakan bahwa Korea Selatan enggan bekerjasama dengan Jepang jika Jepang masih tidak mau mengakui *comfort women* dan tidak mau bertanggung jawab atas isu tersebut (voaindonesia, 2015). Ungkapan tersebut terbukti dengan tidak dilakukannya kunjungan kenegaraan oleh Park sejak ia menjabat sebagai presiden Korea Selatan tahun 2013.

Sehingga dengan diselesaikannya isu *Comfort women*, Jepang berharap dapat menjalin hubungan dengan Korea Selatan lebih erat. Langkah penyelesaian tersebut digunakan Jepang untuk membantu memulihkan masalah-masalah ekonomi yang terjadi di Jepang. Dengan berakhirnya konflik *comfort women*, Jepang akan lebih mudah untuk merumuskan kerja sama-kerja sama dengan Korea Selatan. Tingkat perekonomian Korea Selatan yang tinggi, diharapkan akan membantu Jepang dalam meningkatkan perekonomian negaranya.

Dalam beberapa tahun terakhir, China merupakan negara mitra dagang utama bagi Korea Selatan. Politik luar negeri Korea Selatan dalam bidang ekonomi lebih fokus pada China, terbukti dengan adanya sikap Korea Selatan yang fokus meningkatkan kerjasama FTA dengan China dibandingkan dengan pertemuan EPA (Economic Partnership Agreement) dengan Jepang. Selain itu, impor Korea Selatan terhadap Jepang mengalami penurunan, sehingga dengan diselesaikannya isu *comfort women*, Jepang berharap negaranya akan menjadi mitra dagang utama bagi Korea Selatan (Mukoyama, 2016).

Park Geun Hye berharap dengan dicapainya kesepakatan penyelesaian *comfort women*, kedua negara dapat bekerjasama dalam membangun kepercayaan dan membuka hubungan baru antar kedua negara. Hal tersebut diungkapkan karena kedua negara telah bersusah payah mencapai kesepakatan tersebut (kim & Park, 2015).

B. Tuntutan Dalam Negeri Jepang

Tuntutan untuk segera diselesaikannya isu *comfort women* juga datang dari pengusaha-pengusaha Jepang. Isu *comfort women* berdampak buruk bagi pengusaha-pengusaha Jepang untuk bekerja sama dalam bidang ekspor-impor dan investasi dengan pihak Korea Selatan. Mengingat ekonomi Jepang yang melemah dalam beberapa tahun terakhir, pengusaha-pengusaha mendesak Shinzo Abe untuk mencari solusi dalam menyelesaikan perdebatan isu *comfort women* dengan Korea Selatan. Permintaan pengusaha Jepang ini

disampaikan kepada presiden Korea Selatan juga agar kedua pemimpin tersebut dapat mencari jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi (Obe & Mochizuki, 2015).

Prospek kerja sama dengan Korea Selatan sangat menjajikan bagi pengusaha-pengusaha Jepang mengingat produksi telepon pintarnya, LG dan Samsung, yang telah mendunia. Pengusaha-pengusaha bahan pembuatan telepon dan suku cadang di Jepang menganggap hal itu sebagai kesempatan investasi yang baik. Korea Selatan selama ini telah menjadi pelanggan material dan suku cadang perusahaan otomotif Jepang bagi Hyundai dan KIA (Obe & Mochizuki, 2015).

Akibat permasalahan politik kedua negara, Jepang dan Korea Selatan, hubungan kerja sama pengusaha Jepang dan Korea Selatan sempat memburuk. Sikap politik Jepang pada masa Shinzo Abe dianggap terlalu berpandangan kedepan tanpa melihat sejarah masa penjajahannya. Perusahaan Jepang yang berinvestasi di Korea Selatan dianggap tidak patriotik. Menurut data dari kementerian perdagangan kedua negara tahun 2012, investasi Jepang di Korea Selatan meningkat dua kali lipat dari tahun sebelumnya menjadi \$ 4,5 miliar. Tetapi, jumlah investasi tersebut menurun di tahun-tahun berikutnya karena perselisihan wilayah dan sejarah yang semakin intensif, hal itu juga menyebabkan sentimen publik semakin memburuk (Obe & Mochizuki, 2015).

Penyelesaian isu *comfort women* juga dilakukan Jepang dalam menghadapi pelemahan legitimasi politik dalam negerinya. Pada masa

pemerintahannya, shinzo abe gencar mengembangkan feminisme di Jepang. Seperti pidatonya dalam pertemuan di forum PBB, ia berjanji akan menjadikan perempuan Jepang beradidaya. Ia juga mengatakan bahwa Jepang akan membantu komunitas internasional dalam menghapus kekerasan pada perempuan.

“... We intend to make the 21st century a world with no human rights violations against women. Japan will stand at the fore and lead the international community in eliminating sexual violence during conflicts. ...” (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2014)

Sebelum pidato yang disampaikan Abe dalam pertemuan tingkat tinggi di PBB, pada awal september 2014, Abe mendapatkan pujian dari Direktur Eksekutif Perempuan PBB karena telah meningkatkan jumlah menteri kabinet perempuan, dari dua menjadi lima dari 19 kursi yang tersedia (Morris & Suzuki, 2014).

Sikap pemerintah Jepang yang sedang menggadag-gadangkan feminisme di negaranya tersebut berbanding terbalik dengan perkembangan isu *comfort women* yang masih *stuck*. Meskipun Jepang berjanji akan membantu komunitas internasional dalam mencegah kekerasan seksual, pada kenyataannya Jepang masih terbelit dengan isu *comfort women* yang pada dasarnya merupakan kekerasan seksual pada masa perang. Dengan demikian, sikap pemerintah Jepang ini mendapat kritikan dari beberapa pihak terkait sikap Jepang yang masih menolak isu *comfort women* sebagai bagian pertanggungjawaban dari Jepang.

Pada sebuah konferensi pers yang digelar oleh sekretaris kabinet Jepang, Yoshihide Suga, ia mengatakan bahwa tidak ada perempuan yang dijadikan sebagai *comfort women* secara paksa oleh militer Jepang. Pernyataan tersebut diungkapkan untuk menanggapi seorang jurnalis yang mengkritik peran Jepang dalam mengatasi kekerasan pada konflik bersenjata yang menyinggung masa lalu Jepang terkait isu *comfort women* (Morris & Suzuki, 2014).

Penolakan yang selalu dilakukan Jepang terkait keterlibatannya terhadap *comfort women* menimbulkan protes keras dari sejumlah sejarawan dunia. Lebih dari 180 sejarawan dari berbagai negara mengeluarkan surat terbuka kepada pemerintah Jepang agar berhenti melakukan manipulasi, sensor, dan intimidasi terhadap sejarawan yang menulis Perang Dunia II. Surat terbuka tersebut dibuat karena Jepang selalu memprotes tulisan yang memuat keterlibatan Jepang pada isu *comfort women* (BBC, Jepang diminta hentikan manipulasi jugun ianfu, 2015).

C. Tekanan dari Amerika Serikat dan Korea Selatan

Jepang dan Korea Selatan merupakan negara penting Amerika Serikat untuk mempertahankan kekuatan geopolitiknya di kawasan Asia Timur. Masalah hubungan Jepang-Korea Selatan tentu menjadi beban bagi Amerika Serikat karena hubungan trilateral ketiga negara berpengaruh dengan keharmonisan kedua negara tersebut. Konflik Jepang-Korea Selatan merupakan konflik yang tidak berujung, bahkan saat ini pun kedua negara

masih memiliki konflik wilayah pulau dokdo/takeshima. Dengan menurunnya intensitas masalah yang ada pada kedua negara (Jepang dan Korea Selatan) tentu akan memberikan dampak positif bagi Amerika Serikat sendiri.

Pentingnya keharmonisan hubungan Jepang dengan Korea Selatan, Amerika Serikat ikut terlibat dalam pergerakan hubungan kedua negara. Pada masa pemerintahan Barack Obama, hubungan Jepang dengan Korea Selatan sempat memanas karena kunjungan PM Koizumi Junichiro di kuil Yasukuni pada awal masa pemerintahannya. Kemudian PM Shinzo Abe juga sempat mengunjungi kuil tersebut dan memicu melemahnya hubungan bilateral Jepang-Korea Selatan. Selain masalah kunjungan ke Yasukuni, tidak diakuinya isu *Comfort women* menjadi salah satu masalah besar yang dihadapi Jepang dan Korea Selatan (Wingfield-Hayes, 2013).

Amerika Serikat sempat mendesak Jepang untuk segera menyelesaikan isu *comfort women* pada tahun 2007 dengan membentuk resolusi 121. Resolusi tersebut menjadi perhatian besar di dunia terkait masalah *comfort women* sehingga negara lain yaitu Belanda, Canada, Korea Selatan, Taiwan dan bahkan Uni Eropa ikut mendesak Jepang agar segera menyelesaikan isu *comfort women*. Berkat dukungan masyarakat internasional tersebut, masyarakat Jepang tergerak dan ikut menuntut pemerintahnya agar segera menyelesaikan isu tersebut. Pada tahun 2008, dewan perwakilan Takarazuka City mendesak pemerintah pusat agar menanggapi tuntutan dari masyarakat internasional (The Korean Council for the Women Drafted for Military Sexual Slavery by Japan, 2013).

Pada tahun 2014 Obama mengungkapkan bahwa Jepang dan Korea Selatan harus bersikap ‘move forward’ terkait isu-isu yang melibatkan sejarah masalah lalu Jepang di Korea sehingga hubungan bilateral kedua negara akan membaik mengingat Korea Selatan menolak adanya pertemuan resmi kepala negara. Di tahun yang sama, ketika ketiga negara dipertemukan dalam sebuah konferensi tingkat tinggi di Den Haag, Obama menekankan perlunya memperbaiki hubungan dan meningkatkan kerja sama kepada Jepang dan Korea Selatan (Diplomatic Blue Book, 2015).

Pencapaian kesepakatan penyelesaian isu *comfort women* secara tidak langsung merupakan keberhasilan bagi Amerika Serikat, yang sejak lama telah mendesak kedua Sekutunya yang ada di kawasan Asia Timur untuk mengubur masa lalunya dan bekerja sama untuk menghadapi kekuatan China dan ancaman Korea Utara (Tisdall, 2015). Wakil penasehat keamanan nasional Amerika mengungkapkan bahwa Jepang harus jujur pada sejarah masa lalu terkait masalah-masalah yang melibatkan Korea Selatan. Ia juga menekankan kepada Jepang agar segera menyelesaikan isu *comfort women* tersebut demi masa depan hubungan Jepang-Korea Selatan. Ungkapan tersebut menunjukkan adanya perintah Amerika Serikat untuk segera menyelesaikan isu *comfort women* tersebut terhadap Korea Selatan (Lee, 2015).

Selain desakan yang dilakukan Amerika pada masa administrasi Obama, Korea Selatan sebagai pihak ‘korban’ telah mendesak Jepang untuk mengakui keberadaan *comfort women* dimasa PD II sejak tahun 1991. Sejak

Jepang selalu menepis isu *comfort women* sebagai tanggungjawab Jepang, Korea Selatan mulai mengajukan beberapa tuntutan baik ke Pengadilan Jepang ataupun ke Organisasi Internasional. Pada tahun 1992 Korea Selatan menjadikan isu *comfort women* sebagai isu nasional sehingga diharapkan dengan adanya perhatian publik dan negara, Jepang akan mengakui kejahatan perangnya dan bertanggung jawab terhadap korban-korban *comfort women* yang masih hidup (AWF, 1998).

Sejak tahun 1992, masyarakat Korea bersama dengan aktivis-aktivis yang bergerak dalam isu HAM melakukan demo besar-besaran di depan kantor kedutaan besar Jepang di Seoul. Demonstrasi tersebut disebut dengan *Wednesday Demonstration* dan terus dilakukan hingga kesepakatan penyelesaian isu ini tercapai. Saat memperingati 20 tahun *Wednesday Demonstration* pada tahun 2011, para pendemo mendirikan patung Pyeonghwabi sebagai lambang *comfort women* di depan kantor kedutaan Jepang di Seoul (AWF, 1998).

Pada tahun 2008, Korea Selatan bersama dengan Belanda, Prancis dan Korea Utara mendesak pemerintah Jepang untuk menyelesaikan isu *comfort women* pada *Human Rights Council's Universal Periodic Review(UPR)* di Jepang. Selanjutnya, masih ditahun yang sama, *Human Rights Committee(CCPR)* juga ikut mendesak pemerintah Jepang agar memberikan pertanggungjawaban yang legal dan meminta maaf kepada korban (Japan T. K., 2013).

Pada tahun 2012 yaitu pada masa kepresidenan Lee Myung Bak, ia juga mendesak Jepang untuk segera menyelesaikan isu *comfort women* yang selalu menjadi *trigger* dalam hubungan bilateral Jepang-Korea Selatan dalam pidatonya saat memperingati hari merdeka Korea Selatan (Aquadini, 2012). Selanjutnya, Park Geun Hye sebagai presiden yang menjabat sejak tahun 2013 menolak melakukan kunjungan resminya ke Tokyo. Penolakan tersebut dilakukan karena sikap Jepang yang tidak tegas menyelesaikan isu *comfort women* yang telah dipermasalahkan sejak tahun 1991 (Tisdall, 2015).

Konferensi Tingkat Tinggi kerjasama ekonomi trilateral dengan Jepang juga dibekukan sejak 2013, hal tersebut dilakukan Korea Selatan dan China untuk menanggapi sikap Jepang yang mengabaikan sejarah penjajahan Jepang. Namun demikian, pada 1 November 2015, ketiga negara melakukan pertemuan tingkat tinggi pertamakalinya sejak pembekuan tahun 2012. Pada pertemuan tersebut, Korea Selatan dan Jepang berjanji akan menciptakan kawasan perdagangan bebas trilateral dan mengembangkan 'Pasar Asia Timur' lewat Kemitraan Ekonomi Regional Komprehensif (RCEP) (voaindonesia, 2015).

Pasca pertemuan tersebut, Shinzo Abe secara resmi melakukan pertemuan kepala negara dengan Park Geun Hye. Pertemuan tersebut merupakan *ice breaking* atas hubungan kedua negara yang selama ini membeku. Dalam pertemuan bilateral tersebut, kedua kepala negara membahas masalah-masalah yang menjadi penghambat hubungan Jepang-Korea Selatan. Konflik laut China selatan juga merupakan salah satu bahasan

yang dirundingkan oleh kedua kepala negara. Jepang mengajak Korea Selatan untuk bekerjasama dengan Amerika Serikat untuk menjaga perdamaian di konflik laut china selatan. Korea Selatan menerima tawaran itu karena pada pertemuan sebelumnya Jepang sepakat akan menyelesaikan isu *comfort women* yangmana isu tersebut telah lama menjadi batu penghalang dalam hubungan bilateral Korea Selatan dengan Jepang (Okezone, 2015).

Jepang telah merebut semenanjung Korea dengan menghancurkan sistem kerajaan dan mengambil alih tanah Korea selama 35 tahun yang mengakibatkan tingginya sentimen anti Jepang di Korea. Sentimen anti Jepang selalu dimanfaatkan Korea Selatan sebagai alat diplomasinya untuk mendapatkan keuntungan dari Jepang, yangmana menjadikan sejarah sebagai ‘kartu mati’ bagi Jepang. Seperti yang pernah diungkapkan Park Chung Hee, presiden Korea Selatan ke-3,

“What we most need from Japan is concrete and constructive evidence of repentance for past misdeed and of the new determination to deal fairly with us now and in the future” (Lind, 2009).

Park Chung Hee merupakan Ayah kandung dari Presiden Park Geun Hye. Sifat anti Jepang yang ada pada Park Geun Hye seperti diturunkan dari ayahnya, sehingga menjadi salah satu faktor Park Geun Hye enggan melakukan kunjungan formal ke Jepang, jika Jepang masih tidak mau menyelesaikan masalah *comfort women*. Park Chung Hee sendiri selama menjabat sebagai presiden Korea Selatan juga tidak melakukan kunjungan ke Jepang, yaitu selama 18 tahun (Lind, 2009).

Sikap yang dilakukan kepala negara Korea Selatan ini dapat dikatakan sebagai strategi diplomasi mereka untuk membuat posisi Jepang dilematis. Politik luar negeri Jepang pada kenyataannya masih dipengaruhi Amerika Serikat. Ancaman keamanan Amerika yang dipicu oleh percobaan peluncuran rudal Korea Utara mendesak Korea Selatan dan Jepang untuk bekerja sama dalam menghadapi ancaman dari Korea Utara. Dengan keadaan yang sulit dalam hubungan Jepang-Korea Selatan tentu menghalangi kerja sama yang seharusnya dapat mudah dibangun.